



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AYUB KOMBONG**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **463288**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.105.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/168 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/144 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/140 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/126 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 31.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU PIC UP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIZ125R Tahun 2004, HIBAH TANPA AKTA Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER MXKING 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, ZUZUKI SKAYDRIVE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 748.000.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 6.357.635

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.890.357.635

**III. HUTANG**

Rp. 394.073.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.496.284.635

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.